



Risalah Kebijakan

Nomor 6, September 2023



Urgensi Pendekatan Asimetris dalam Program Sekolah Penggerak



Ringkasan

- Program Sekolah Penggerak (PSP) dirancang untuk mengupayakan perbaikan kualitas pendidikan melalui pendekatan asimetris dengan mempertimbangkan sejumlah tantangan dan keunikan masing-masing satuan pendidikan. Untuk menyediakan dasar bagi pelaksanaan pendekatan asimetris tersebut, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP) melakukan studi pendahuluan guna mengetahui kondisi awal satuan pendidikan pelaksana PSP, khususnya pada angkatan 2.
- Dari hasil studi ini diperoleh gambaran mengenai keragaman kondisi satuan pendidikan pelaksana PSP Angkatan 2, mulai dari karakteristik wilayah, kondisi akses internet dan listrik, serta pemahaman kepala sekolah dan guru mengenai substansi Kurikulum Merdeka.
- Berdasarkan keragaman kondisi satuan pendidikan tersebut, risalah kebijakan ini merekomendasikan perlunya penyesuaian dalam pendekatan program yang lebih asimetris sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan. Pendekatan asimetris tersebut dapat dilakukan dalam konteks intervensi pelatihan Komite pembelajaran, pendampingan satuan pendidikan, maupun insentif lain yang melekat pada PSP.

Konteks

Terdapat kesenjangan yang cukup besar terkait dengan kualitas pendidikan antara sekolah yang ada di daerah tertinggal dan daerah nontertinggal. Sekolah di daerah nontertinggal sering dianggap lebih baik dan lebih maju daripada sekolah di daerah lainnya, salah satunya dari aspek sarana dan prasarana yang berdampak pada hasil belajar murid. Selain sarana prasarana, kesenjangan juga masih terlihat dari kuantitas dan kualitas guru. Jumlah guru yang kurang memadai ini banyak terjadi di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan. Banyak satuan pendidikan yang hanya memiliki sekitar 3 - 4 orang guru bahkan kurang, padahal kebutuhan guru di jenjang SD membutuhkan minimal 6 guru pada setiap tingkat kelas. Sementara jenjang SMP membutuhkan minimal 13 guru agar setiap mata pelajaran diajar oleh guru yang sesuai. Sementara itu, di daerah perkotaan yang sarana dan prasarananya memadai terjadi penumpukan guru (Nasution, 2016). Tidak hanya kuantitas, kualitas atau mutu seorang guru juga memegang posisi yang strategis dalam mencapai kualitas pendidikan yang baik.

Selain masalah guru, perbedaan karakteristik geografis juga berpengaruh kepada kesenjangan akses dan sarana prasarana yang terdapat di sekolah. Permasalahan ketersediaan listrik dan internet, perbedaan kondisi geografis, dan faktor-faktor lain menunjukkan bahwa keragaman wilayah di Indonesia tidak bisa disamakan dengan satu standar yang sama. Oleh karena itu, Program Sekolah Penggerak (PSP) menerapkan pendekatan asimetris untuk mencapai pemerataan mutu pendidikan dengan metode yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan di masing-masing sekolah.

PSP merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerataan mutu pendidikan di seluruh Indonesia (Pusat Penelitian Kebijakan, Kemendikbud, 2020). Pemerataan memberi penekanan bahwa layanan pendidikan harus menjangkau setiap warga negara dari beragam latar belakang dan konteks sosial-budaya yang berbeda-beda. Indonesia dengan keberagamannya, mulai dari kondisi geografis, budaya, agama, ras, dan lain sebagainya, memerlukan adanya pemerataan dengan sistem keadilan untuk memastikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks setempat. PSP memberikan fasilitas kepada satuan pendidikan untuk memanfaatkan kreativitas dan membuat perubahan berdasarkan kebutuhan masing-masing demi mewujudkan hak pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia.

PSP dirancang untuk mengupayakan perbaikan kualitas pendidikan melalui pendekatan asimetris dengan mempertimbangkan sejumlah tantangan dan keunikan masing-masing satuan pendidikan. Pendekatan asimetris disusun berdasarkan kesadaran bahwa kebijakan yang bersifat *one size fits all* tidak lagi relevan untuk dilaksanakan. Program Sekolah Penggerak berusaha untuk tidak memperlakukan masalah pada setiap satuan pendidikan di Indonesia dengan standar yang sama, tetapi menggunakan pendekatan yang bervariasi dan berupaya mengambil langkah perubahan yang disesuaikan dengan konteks wilayah masing-masing satuan pendidikan. Upaya awal untuk mendapatkan gambaran tantangan dalam pemerataan mutu pendidikan adalah dengan melakukan sejumlah asesmen agar para pemangku kepentingan dapat memetakan permasalahan dan mampu memberikan intervensi yang tepat.

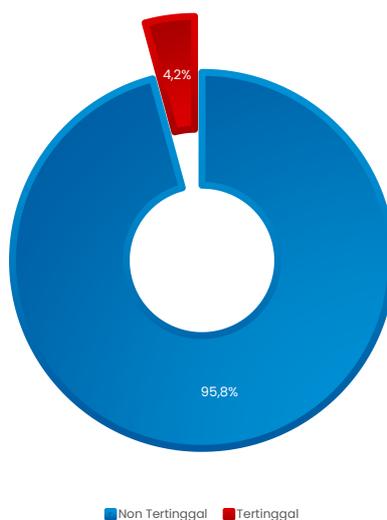
Sejak 2021, Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan (PSKP), Kemendikbudristek, melakukan studi untuk melihat kondisi dan konteks sekolah yang menerapkan PSP. Hal ini ditujukan untuk memberikan gambaran terkait akses sekolah terhadap listrik dan internet, perangkat digital, hasil belajar siswa, hingga proses adaptasi sekolah terhadap Kurikulum Merdeka pada satuan pendidikan pelaksana PSP. Salah satu kebijakan yang dilakukan sejak tahun 2021 adalah memberikan modul pelatihan dalam bentuk digital pada satuan pendidikan yang memiliki akses internet dan modul pelatihan dalam bentuk cetak pada sekolah yang tidak memiliki akses internet dan listrik. Metode pelatihan juga disesuaikan dengan akses internet di satuan pendidikan, sehingga bisa berbentuk daring atau luring. Pada 2022, studi lanjutan yang dilakukan

menunjukkan hasil serupa, yang mana PSP angkatan 2 masih dihadapkan dengan sejumlah tantangan yang beragam sehingga membutuhkan pendekatan dan intervensi yang berbeda bagi setiap satuan pendidikan. Pengembangan pendekatan kebijakan yang bersifat asimetris perlu terus dilakukan guna menyukseskan program ini.

Risalah kebijakan ini mengulas kondisi akses, sarana prasarana, kecukupan SDM guru, dan gambaran umum kualitas pendidikan sebelum masa intervensi PSP, dengan data yang diperoleh melalui survei daring dan data sekunder. Survei dilakukan pada Februari 2022 kepada kepala satuan pendidikan PSP angkatan 2 di jenjang PAUD, SD, SMP, SMA maupun SLB. Selain hasil survei, data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) juga digunakan untuk melihat kondisi awal satuan pendidikan. Analisis terhadap kondisi satuan pendidikan pelaksana PSP angkatan 2 ini dapat menjadi dasar dalam menerapkan pendekatan asimetris yang diperlukan dalam pendampingan PSP.

Temuan #1: Program Sekolah Penggerak tidak hanya menjangkau satuan pendidikan di daerah nontertinggal, namun juga di daerah tertinggal.

Program Sekolah Penggerak tidak hanya menjangkau sekolah-sekolah di wilayah maju dengan akses yang mudah, tetapi juga menjangkau wilayah-wilayah tertinggal yang kerap memiliki tantangan sendiri, baik dari segi kondisi geografis, sarana dan prasarana di sekolah, juga ketersediaan sumber daya manusianya.

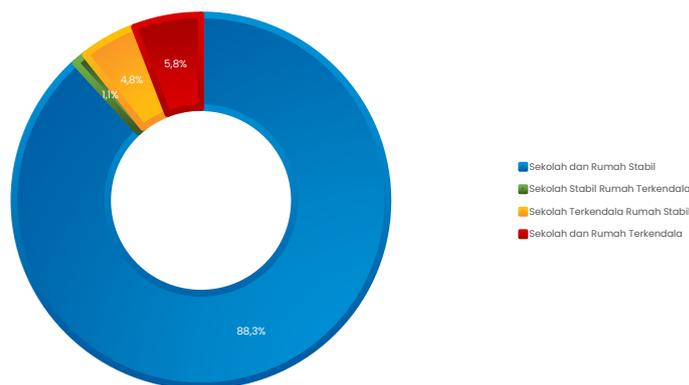


Grafik 1 Satuan Pendidikan di Wilayah Tertinggal dan Nontertinggal (n=6.742)

Hasil survei menunjukkan terdapat 96,8% atau sebanyak 6.459 satuan pendidikan yang mengikuti Program Sekolah Penggerak yang berada di wilayah nontertinggal (Grafik 1). Sisanya, 4,2% atau sebanyak 283 satuan pendidikan berada di wilayah tertinggal. Perbedaan karakteristik wilayah ini sejalan dengan temuan berikutnya, di mana kategori wilayah ini menggambarkan perbedaan pada karakteristik satuan pendidikan terutama terkait akses listrik dan internet.

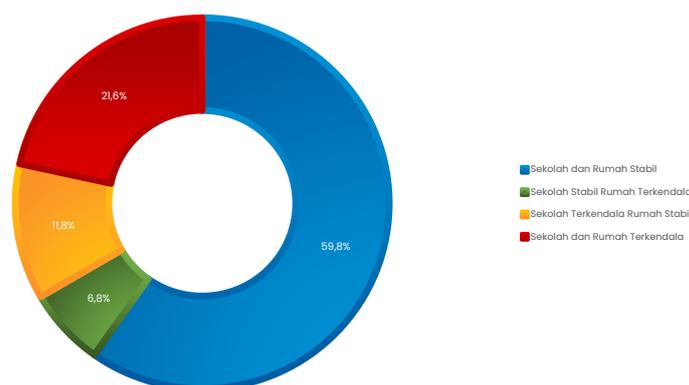
Temuan #2: Kondisi akses internet dan listrik umumnya stabil, namun terdapat sebagian yang mengalami kendala, terutama di daerah tertinggal.

Akses listrik pada sekolah yang mengimplementasikan Program Sekolah Penggerak masih menjadi tantangan. Data survei menunjukkan sebanyak 372 kepala sekolah (5,8%) dari total 6.780 satuan pendidikan masih mengalami kendala akses terhadap listrik, baik di sekolah maupun di rumah (Grafik 2).



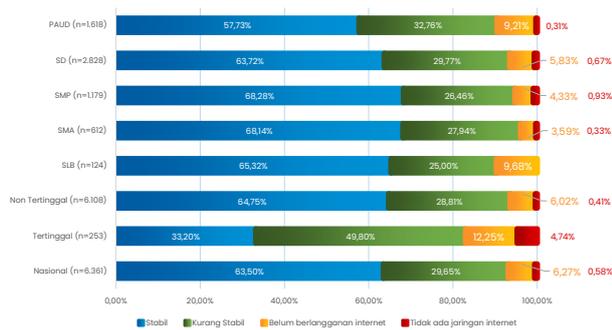
Grafik 2 Kondisi Listrik di Sekolah dan di Rumah menurut Kepala Sekolah

Selain akses listrik, tantangan juga terlihat pada akses internet. Masih terdapat 21,6% kepala sekolah yang mengalami kendala terhadap akses internet, baik di sekolah maupun di rumah (Grafik 3). Permasalahan ini dialami merata di seluruh jenjang pendidikan. Di sisi lain, 59,8% kepala sekolah merasakan bahwa jaringan internet di sekolah maupun di rumah sama-sama stabil.

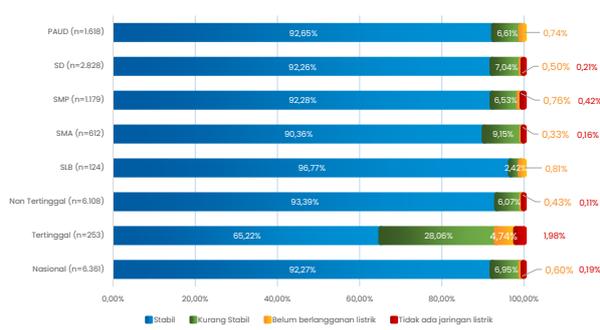


Grafik 3 Kondisi Internet di Sekolah dan di Rumah menurut Kepala Sekolah

Permasalahan listrik dan internet tidak hanya dialami oleh kepala sekolah, tetapi juga guru. Hasil survei menunjukkan bahwa akses listrik masih menjadi tantangan bagi guru khususnya di daerah tertinggal, sementara akses internet menjadi tantangan bagi guru baik di daerah tertinggal maupun non-tertinggal (Grafik 4 dan 5).



Grafik 4 Akses Internet di Lingkungan Rumah menurut Guru



Grafik 5 Akses Listrik di Lingkungan Rumah menurut Guru

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 34,78% guru di daerah tertinggal memiliki kendala jaringan listrik. Sementara pada daerah non-tertinggal, kendala jaringan listrik hanya dialami oleh 6,61% guru. Sama halnya dengan kepala sekolah, guru juga masih terkendala akses jaringan internet di lingkungan rumahnya. Hanya 33,20% guru di daerah tertinggal yang memiliki jaringan internet stabil. Sisanya, guru mengakui terkendala jaringan internet. Kendala tersebut sebagian besar dikarenakan wilayah yang memang belum memiliki akses internet, dan sebagian lainnya karena belum berlangganan internet. Permasalahan internet tidak hanya dialami oleh guru di wilayah tertinggal, guru di daerah non-tertinggal juga mengalami hal serupa. Sebanyak 35,25% guru di wilayah non-tertinggal mengaku masih mengalami permasalahan jaringan internet. Kendala jaringan internet dan listrik ini dapat memengaruhi efektivitas penerapan kebijakan yang menggunakan teknologi seperti pendaftaran PSP, pelatihan kepala sekolah, akses terhadap sumber ajar, dan lainnya.

Temuan #3: Pemahaman kepala sekolah dan guru pada satuan pelaksana PSP terhadap Kurikulum Merdeka relatif beragam.

Pemahaman kepala sekolah dan guru merupakan fondasi utama dalam mengimplementasikan Program Sekolah Penggerak. Untuk itu, terdapat pelatihan Komite Pembelajaran selama 84 JP untuk meningkatkan pemahaman substansi Kurikulum Merdeka pada setiap satuan pendidikan. Hasil *post test* pelatihan komite pembelajaran menunjukkan disparitas pemahaman, khususnya terkait Kurikulum Merdeka. Hanya 49,75% kepala sekolah yang mendapatkan skor >65 (predikat sangat baik dan baik). Sementara hasil *post test* peserta pelatihan dari unsur guru menunjukkan hanya 33,42% guru yang memperoleh skor >65.

Implikasinya, kecepatan proses adaptasi satuan pendidikan terhadap Kurikulum Merdeka juga relatif beragam. Hasil kunjungan lapangan terhadap satuan pendidikan pelaksana PSP angkatan 2 menunjukkan beberapa sekolah tidak mengalami kesulitan dalam memahami dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Namun demikian, ditemukan juga berbagai miskonsepsi dalam implementasi kurikulum, baik dalam pembelajaran intrakurikuler maupun proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5). Miskonsepsi pada pembelajaran intrakurikuler, misalnya praktik pembelajaran berdiferensiasi dilakukan berdasarkan gaya belajar siswa, bukan mempertimbangkan kemampuan awal siswa. Sementara miskonsepsi dalam pelaksanaan P5, misalnya masih banyaknya sekolah yang menjalankan proyek berorientasi pada produk dan karya siswa, bukan berorientasi pada penguatan karakter sesuai dimensi profil pelajar Pancasila.

Rekomendasi Kebijakan

Temuan di atas menunjukkan keragaman satuan pendidikan pelaksana PSP khususnya pada angkatan 2, dilihat dari karakteristik wilayah, sarana dan prasarana khususnya akses listrik dan internet, serta pemahaman terhadap Kurikulum Merdeka. Sejak awal, desain PSP menolak kebijakan dengan paradigma *one size fits all*, sehingga dalam tataran teknis intervensi PSP perlu dijalankan secara asimetris dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan. Pendekatan asimetris tersebut antara lain dapat diwujudkan dalam berbagai intervensi berikut:

1. Diversifikasi moda pelatihan komite pembelajaran serta sumber belajar

Desain umum pelatihan komite pembelajaran yang menggunakan metode daring awalnya ditujukan untuk mengakomodasi kebutuhan di masa pandemi dan memudahkan perluasan akses di banyak wilayah. Namun, metode ini menjadi kurang tepat ketika diterapkan pada satuan pendidikan yang terkendala akses. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan PSP angkatan selanjutnya, perlu dipertimbangkan pendekatan pelatihan secara luring, terutama untuk daerah yang mengalami kesulitan akses listrik dan internet. Selain itu, untukantisipasi hambatan peserta pelatihan dalam mengakses LMS, perlu disiapkan sumber pembelajaran yang dapat didistribusikan secara *offline*, misalnya melalui *flashdisk*.

2. Diversifikasi moda, intensitas, dan materi pendampingan sesuai dengan kebutuhan kondisi sekolah

Teori perubahan PSP berangkat dari asumsi bahwa pintu transformasi satuan pendidikan dimulai dari peningkatan kapasitas SDM. Dalam konteks ini, optimalisasi pendampingan SDM satuan pendidikan perlu dilakukan mengikuti kebutuhan dan kondisi sekolah. Keragaman strategi pendampingan perlu dilakukan, setidaknya terkait tiga hal. *Pertama*, memberikan alternatif moda pendampingan secara luring, terutama bagi satuan pendidikan dengan akses listrik dan internet terbatas. *Kedua*, memberikan pendampingan lebih intensif kepada satuan pendidikan yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan program, terutama dalam konteks pembelajaran. *Ketiga*, memberikan materi pendampingan sesuai permasalahan prioritas yang dihadapi satuan pendidikan.

3. Diversifikasi insentif yang melekat pada Program Sekolah Penggerak

Salah satu bantuan yang diberikan pada SP adalah bantuan *chromebook*. Agar bantuan tepat sasaran, hibah *chromebook* tidak diberikan seragam melainkan hanya pada satuan pendidikan yang paling membutuhkan. Oleh karena itu, perlu dicari tahu sekolah mana saja yang masih kekurangan perangkat elektronik agar proses digitalisasi bisa lebih merata dan menyasar ke sekolah-sekolah yang paling membutuhkan. Prinsip yang sama juga perlu dijalankan dalam pemberian BOS/P Kinerja. Selain mempertimbangkan perbedaan jenjang sebagaimana telah dilakukan saat ini, penentuan jumlah BOS/P Kinerja dapat mempertimbangkan juga jumlah siswa pada satuan pendidikan.

Daftar Pustaka

Nasution, E. (2016). Problematika pendidikan di Indonesia. *Mediasi*, 8(1).

Pusat Penelitian Kebijakan, Kemendikbud. (2020). Naskah akademik program sekolah penggerak.

Rahman, M. F., dkk. (2020). Bhinneka tunggal ika sebagai benteng terhadap risiko keberagaman bangsa Indonesia. *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, 6(2).

Risalah Kebijakan ini merupakan hasil dari kajian yang dilakukan oleh **Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan**

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan
Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kompleks Kemdikbud, Gedung E, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270
Telp. 021-5736365, 5713827



Tim Penyusun

**Indah Pratiwi
Bakti Utama
Siti Nur Azizah**